

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan. Zakat hukumnya wajib (fardhu) atas setiap muslim. Zakat merupakan ibadah sama halnya dengan shalat, haji, dan puasa. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradapan islam (Emir, 2016).

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga, merupakan instrument utama dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (kaya) kepada *the have not* (miskin). Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah telah diatur undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia.

OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan Lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dijelaskan zakat, infaq/sedekah harus dikelola berdasarkan prinsip Syariah namun dari penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa sebagian besar pengelola zakat di Indonesia masih belum menerapkan berdasarkan PSAK No. 109, yaitu tentang bagaimana pengakuan dan pengukurannya, penyajiannya serta pengungkapan dana zakat, infaq/sedekah. Asas utama dari pengelola zakat masih menempatkan kejujuran dan amanah sehingga membuat kurang percayanya muzakki mempercayakan dananya kepada pengelola zakat (Arief *et al.*, 2017). Dengan diterapkannya berdasarkan Standar Akuntansi Syariah maka akan terciptanya laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan.

Lembaga zakat termasuk dalam organisasi publik, yang mana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki, Ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.

Secara mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, akan tetapi pemahaman membayar zakat masih minim dikalangan masyarakat. Apabila seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka Indonesia memiliki potensi untuk mngembangkan pemerataan pendapatan melalui zakat.

Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap Lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan.

PSAK 109 adalah landasan yang kuat untuk sistem pencatatan akuntansi dalam organisasi badan amil zakat (BAZ) maupun lembaga amil zakat (LAZ) sehingga terciptanya laporan keuangan yang wajar. Namun pada praktiknya masih banyak badan amil zakat yang belum menerapkan PSAK 109 secara keseluruhan. Kendala dalam penerapan tersebut menarik para peneliti untuk melakukan penelitian terkait penerapan PSAK 109.

Peneliti megambil BAZNAS Kota Balikpapan sebagai objek penelitian dalam menganalisis penerapak PSAK 109 pada badan amil zakat. Proses pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Balikpapan memiliki beberapa program kerja yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan serta dakwah. Pemilihan

objek ini dilatar belakangi karena adanya aturan BAZNAS yang diharuskan untuk menerapkan PSAK 109.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BALIKPAPAN” dengan harapan adanya penelitian ini dapat membantu memahami dan penyelarasan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Balikpapan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka, yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Balikpapan sudah sesuai dengan PSAK 109?
2. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Balikpapan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti serta mengetahui perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi ZIS pada penyajian laporan keuangan yang terdapat di BAZNAS Kota Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan para pembaca sebagai referensi dalam hal menambah pengetahuan mengenai akuntansi zakat, infaq dan Sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelolaan zakat (LAZ/BAZ).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan badan amil zakat dalam hal penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang benar dan tepat didalam penyajian lapoan keuangan yang telah sesuai dengan standart yang telah dibuat oleh IAI yaitu PSAK 109 khususnya untuk BAZNAS Kota Balikpapan